

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Ekonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian. Koesoemahatmadja (1979) berpendapat bahwa otonomi itu mengandung arti perundangan (*bestuur*). Lebih jauh diungkapkan CW. Van der Pat "*Autonomie betehent ander dan Het word zon daen Vermdeden regehing en bestuur van Eigen zaken, van wat de grond wet noemt ligen huishording*" (otonomi itu berarti peraturan dan pemerintahan dari urusan sendiri).

Bayu Suryaningrat (1980) berpendapat bahwa otonomi berarti mengatur sendiri, melaksanakan pemerintahan sendiri.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa otonomi adalah menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dalam pengertian menyelenggarakan pemerintahan sendiri ini terkandung unsur hak dan wewenang. Tanpa adanya hak dan wewenang suatu lembaga tidak akan dapat melaksanakan pemerintahan sendiri. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa pengertian otonomi adalah hak dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. (Djaenuri,dkk 2003)

Pengertian otonomi dapat juga ditemukan dalam literature Belanda, dimana otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri) (Sarundajang, 2005).

Sarundajang (2005) juga menyatakan bahwa otonomi daerah pada hakekatnya adalah:

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah.

- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
- d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. Otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Sejalan dengan hal itu, Soepomo dalam Ladjin (2008) mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri dalam kadar Negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.

Menurut Sarundajang (2005), tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya akan meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

- a. Dari segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
- b. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
- c. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan upaya pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak

terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhannya.

- d. Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Martin dalam Paturusi (2009) mengemukakan bahwa tujuan utama otonomi daerah pada era otonomi daerah telah tertuang dalam kebijakan desentralisasi sejak tahun 1999, yakni:

- a. Pembebasan pusat, maksudnya membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban tidak perlu mengenai urusan domestik sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama sangat diharapkan pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada kebijakan makro nasional dari yang bersifat strategis.
- b. Pemberdayaan lokal atau daerah. Alokasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Artinya *ability* (kemampuan) prakarsa dan kreativitas daerah akan terpacu sehingga kapasitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat.
- c. Pengembalian *trust* (kepercayaan) pusat ke daerah. Desentralisasi merupakan simbol lahirnya kepercayaan dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini dengan sendirinya mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat daerah. (Paturusi, Idrus A, dkk. 2009)

2.1.3 Konsep Dasar Otonomi Daerah

Menurut Ryaas Rasyid dalam Syamsuddin Haris (2007:10), konsep dasar otonomi daerah yang melandasi lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang 25 tahun 1999, dan menjadi tonggak lahirnya otonomi daerah dan desentralisasi, yaitu:

- a. penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik pada daerah. Selain bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis nasional, semua bidang pemerintahan lain dapat didesentralisasikan;
- b. penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan

- kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan dan penyaluran aspirasi masyarakat harus dilakukan;
- c. pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula;
 - d. peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
 - e. peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan daerah, pembagian *revenue* dari sumber penerimaan yang terkait dengan kekayaan alam, pajak, retribusi, tata cara, serta syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah;
 - f. perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat *block grant*, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga swadaya pembangunan yang ada; dan
 - g. pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial sebagai satu bangsa.

2.2 Potensi Ekonomi Daerah

2.2.1 Teori Ekonomi Daerah

Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi dalam bahasan ilmu ekonomi tradisional. Ilmu ekonomi regional memiliki kekhususan dalam menjawab pertanyaan *where*, yaitu tentang di mana lokasi dari suatu kegiatan yang seharusnya, namun tidak menunjuk pada lokasi konkrit. Ilmu ekonomi regional pada umumnya memiliki tujuan yang sama dengan teori ekonomi umum, yaitu *full employment, economic growth, dan price stability*.

Ilmu ekonomi regional bermanfaat untuk membantu perencana wilayah menghemat waktu dan biaya dalam memilih lokasi. Pada implementasi fisik di lapangan, ilmu ekonomi regional harus diimplementasikan dengan cabang ilmu lain yang cocok dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Ilmu ekonomi regional murni membicarakan prinsip-prinsip ekonomi yang terkait dengan wilayah. Terdapat 2 kelompok ilmu yang lazim menggunakan ilmu

ekonomi regional sebagai peralatan analisis. *Regional science* adalah gabungan berbagai disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisis kondisi suatu wilayah dengan menekankan analisisnya pada aspek-aspek sosial ekonomi dan geografi, sedangkan *regional planning* yang lebih menekankan analisisnya pada aspek-aspek tata ruang, *land use* (tata guna lahan) dan perencanaan (*planning*).

Ilmu ekonomi regional dan ekonomi pembangunan mempunyai sasaran yang sama, yaitu mencari langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, akan tetapi, keduanya berbeda terutama karena luas cakupannya. Hampir semua disiplin ilmu berguna dalam perencanaan pembangunan. Ilmu ekonomi regional dapat berperan dalam penentuan kebijakan awal, seperti menyarankan komoditi atau kegiatan apa yang perlu dijadikan unggulan dan di wilayah mana komoditi itu dapat dikembangkan.

Sampai saat ini, para ahli ekonomi regional masih memiliki pandangan yang berbeda tentang materi apa saja yang termasuk dalam kategori ilmu ekonomi regional. Namun, cakupan ilmu ekonomi regional tidak mungkin dibahas lepas dari induknya, yaitu teori ekonomi umum (terutama cabang ekonomi makro dan ekonomi pembangunan).

Ekonomi regional adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari pada sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha/kegiatan, baik ekonomis, maupun sosial. Sedangkan ekonomi perencanaan regional adalah pemanfaatan teori-teori ekonomi regional untuk merencanakan alokasi sumber-sumber daya ekonomi regional yang terbatas jumlahnya secara efisien. Kegiatan-kegiatan seperti rumah tangga, pertokoan, perdagangan besar, pabrik-pabrik, sekolah-sekolah, tempat ibadah, bank, unit pertanian, dan pertambangan, lokasinya tidak asal saja, melainkan menunjukkan pola dan susunan yang dapat diselidiki dan dapat dimengerti dengan memanfaatkan teori-teori ekonomi regional.

Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidakmerataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh **Robert Solow** yang dikenal dengan Model pertumbuhan neo-klasik. Beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan teori pertumbuhan tersebut dengan menggunakan data-data daerah.

Kebijakan ekonomi regional adalah penggunaan secara sadar berbagai macam peralatan (*instrument* atau *means*) untuk merealisasikan tujuan regional yang ingin dicapai. Mungkin dalam jangka panjang apa yang menjadi tujuan itu

akhirnya juga akan tercapai tanpa usaha secara sadar, tetapi dilihat dari sudut sosial, politis atau ekonomis, lebih baik kalau tujuan itu dicapai dalam jangka pendek atau menengah melalui campur tangan pemerintah.

Untuk melihat ketidakmerataan pertumbuhan regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan: (1) Pertumbuhan output; (2) Pertumbuhan output per pekerja; dan (3) Pertumbuhan output perkapita. Pertumbuhan output digunakan untuk mengetahui indikator kapasitas produksi. Pertumbuhan output per-pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitif daerah, sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi regional terdapat banyak teknik analisis untuk menentukan atau memilih aktivitas ekonomi yang akan dikembangkan dalam suatu daerah atau untuk memilih atau menentukan lokasi atau daerah bagi suatu aktivitas ekonomi atau suatu proyek atau membuat perencanaan pengembangan sektor-sektor ekonomi regional. Di antara teknik-teknik analisis tersebut yang tergolong populer dan sederhana adalah *Location Quotient (LQ)*, *Capital-Output Ratio/Incremental Capital-Output Ratio*, *Model Input-Output Leontief*, *Social Accounting Matrix (Neraca Sosial Ekonomi)*, *Computable General Equilibrium (CGE)*, Ekonometrika Persamaan Tunggal dan Simultan, *Policy Analysis Matrix (PAM)*, Analisis Biaya Komparatif, Analisis Kompleks Industri, dll.

2.2.2 Teori Kutub Pertumbuhan

Inti teori yang dikemukakan oleh Perroux (1955) dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam proses perubahan akan timbul industri unggulan yang merupakan penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Karena keterkaitan antara industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri unggulan tersebut.
- b. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah, sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya.
- c. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang

tergantung dengan industri unggulan/pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju/aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

Menurut Badrudin (1999:175), terdapat dua hal penting yang berkaitan dengan kutub pertumbuhan: *pertama*, kutub pertumbuhan merupakan sekelompok kegiatan industri yang mempunyai keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat terhadap sebuah industri yang unggul, sehingga akan mempunyai kemampuan untuk menggerakkan aktivitas perekonomian dan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. *Kedua*, kelompok industri tersebut akan berupaya memilih lokasi pada kota-kota besar dengan mempertimbangkan kemudahan berbagai prasarana dan fasilitas, namun tetap memperhatikan hubungan dengan daerah pendukung (*hinterland*) sebagai salah satu pemasok input atau sumber daya, konsep ini dikenal dengan aglomerasi ekonomi.

2.3 Pengembangan Wilayah dalam Rangka Mengurangi Ketimpangan

Dasgupta, Thapar, dan Kittiprapas (World Bank, 1997) mengklasifikasi pengembangan wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan wilayah yang telah banyak dipraktekkan di berbagai negara menjadi lima paradigma/model, yaitu sebagai berikut:

a. *The Fiscal-Transfers-Equalizing Role of the State*

Paradigma ini mendasarkan kepada premis bahwa mekanisme pasar tidak bisa mengurangi ketimpangan antarwilayah. Wilayah yang dikaruniai limpahan sumber daya (keuntungan lokasi, SDA, SDM, infrastruktur publik, ekonomi aglomerasi, dan modal swasta) akan tumbuh pesat, sedangkan wilayah yang tak memiliki limpahan ini akan tumbuh lambat. Untuk itu, perlu campur tangan pemerintah dalam bentuk transfer uang ke wilayah terbelakang. Meskipun model ini dipraktekkan di berbagai negara, tetapi efektivitasnya dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah dipertanyakan.

b. *Enhancing Market Forces: Factor Mobility and Product Market Integration*

Premis dari paradigma ini adalah bahwa kekuatan pasar akan mengurangi kesenjangan wilayah. Wilayah yang lebih miskin bisa mengejar ketertinggalannya melalui penemuan/eksploitasi SDA baru, pengembangan SDM, mobilisasi tenaga kerja dan migrasi, pengurangan biaya transport dan kendala lokasi, serta perbaikan infrastruktur publik.

Peran yang diharapkan dari negara adalah melenyapkan kendala faktor tenaga kerja dan modal swasta, dan dalam hal mengintegrasikan pasar. Masalah yang dihadapi adalah antara lain: butuh waktu yang lama untuk mencapai keseimbangan wilayah, karena kekuatan aglomerasi ekonomi pusat pemerintahan menghambat jalannya penyebaran kegiatan ekonomi, dan membangun SDM serta modal fisik membutuhkan waktu sangat lama.

c. *The State-Led (Infrastructure) Investment Model*

Penanaman modal yang diarahkan oleh negara dapat mengembangkan wilayah miskin (misalnya jalan, air baku, tenaga listrik, dan telekomunikasi). Dalam prakteknya, strategi ini ada yang tidak berhasil. Penanaman modal publik akan paling efektif apabila dituntun oleh permintaan sektor swasta (bukan sebaliknya), dan upaya ini "dihargai" secara pantas serta tidak disubsidi secara berlebihan. Penanaman modal untuk melayani kebutuhan dasar manusia, misalnya sekolah dasar dan kesehatan, prasarana kecil tetapi penting seperti penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan, atau jaringan jalan yang sangat sederhana dianggap lebih efektif dan dituntut oleh permintaan.

d. *The Growth Pole or Strategic Investment Model*

Ide model ini adalah penanaman modal strategis di sektor atau industri andalan dapat membawa wilayah terbelakang ke arah pertumbuhan baru sesuai yang diinginkan. Namun, sayangnya upaya intervensi strategis, strategi kutub pertumbuhan, dan intervensi lokasi industri tidak bekerja secara baik di banyak kasus.

e. *The Institutional Model: Centralization vs Decentralization*

Belajar dari banyaknya kegagalan yang dialami oleh struktur yang tersentralisasi dalam mengembangkan dan menyeimbangkan wilayah secara berkelanjutan, maka diperlukan perubahan struktur administratif dan institusi, dari struktur yang tersentralisasi ke struktur yang terdesentralisasi. Alasannya: (a) struktur yang tersentralisasi mengabaikan karakter lokasi atau keanekaragaman kondisi dan preferensi lokal, sedangkan (b) desentralisasi akan memperkuat penyampaian jasa pelayanan publik lokal secara lebih efisien. Namun, cara ini ternyata juga tidak dapat menghapuskan ketidakseimbangan wilayah.

Menurut Dasgupta *et.al* tersebut, masing-masing model di atas memiliki kelemahan. Jalan terbaik yang perlu diambil adalah melakukan kombinasi model

pengembangan wilayah tersebut. Artinya, menyusun kebijakan publik yang kuat yang bersendikan kebijakan pusat yang efektif (stabilitas makro ekonomi, memperkuat faktor pasar dan integrasi pasar, penanaman modal publik antarwilayah, dan transfer fiskal ke wilayah miskin) dan membentuk struktur dan kebijakan administratif dan *institutional* lokal yang efektif (mengurangi *pemburu rente*, menarik penanaman modal swasta, dan menyediakan jasa layanan lokal secara efektif dan akuntabel).

Untuk menganalisis suatu kawasan diperlukan suatu disiplin ilmu yang dikenal sebagai ilmu wilayah, yang pada hakekatnya bersifat multi disiplin ilmu yang berdimensi ruang (*region*) seperti: desa, kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Pembangunan Kawasan tidak lain adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kesalingtergantungan dan ineraksi antara sistem ekonomi (*economic system*), manusia atau masyarakat (*social system*), dan lingkungan hidup beserta sumber daya alam (*eco system*) yang ada didalamnya. Kawasan adalah merupakan unit geografis dengan batas-batas tertentu yang bagian-bagiannya saling tergantung satu sama lain secara fungsional ini dikembangkan dalam bentuk pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun hankam secara berkeseluruhan dan berkesinambungan. Analisis Kawasan pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan proses bagaimana berbagai kegiatan kehidupan mengorganisasikan diri dalam suatu ruang geografi untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai kegiatan ini meliputi kegiatan sosial budaya seperti adat-istiadat, mata pencaharian utama, dan tingkat pendidikan; kegiatan ekonomi; kegiatan pelestarian lingkungan, dan kegiatan lain yang sudah ada.

Secara garis besar, analisis pengembangan kawasan dapat dilakukan dengan memakai dua model, yaitu model Pengembangan Kawasan sisi penawaran (*Supply Side Regional Development*) dan model Pengembangan Kawasan sisi kebutuhan (*Demand Side Regional Development*). Analisis model pertama didasarkan pada pemikiran bahwa kembangkan dulu sumberdaya yang ada (suplai input dan output) baru kemudian demand terhadap sumberdaya tersebut (industri hulu dan hilir) akan muncul dengan sendirinya. Sedangkan model kedua memandang perlunya disediakan lingkungan kebutuhan-kebutuhan konsumtif yang layak bagi masyarakat sekarang maupun yang akan datang, yaitu dengan membangun daerah urban dan kota-kota besar maupun pusat-pusat pemukiman. Kedua model ini merupakan langkah pengintegrasian pusat-pusat pertumbuhan melalui perencanaan yang menyeluruh

Selain persiapan dan perencanaan lahan kawasan, pengembangan kawasan juga memerlukan dukungan-dukungan prasarana operasional yang harus

direncanakan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaannya. Perencanaan parasarana pendukung ini sangat menentukan kesiapan dan keberhasilan pembangunan dan pengembangan kawasan potensial di daerah untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Diantara prasarana pendukung yang sangat penting dan akan dijelaskan berikut ini, antara lain adalah masalah kelembagaan masyarakat, teknologi yang digunakan, dan perencanaan biaya.

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah.

Namun dipihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah. Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor.

Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah: **pertama**, mengenali ekonomi wilayah, dan **kedua**, merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.

2.3.1 Mengenali Ekonomi Wilayah

Isu-isu utama dalam perkembangan ekonomi daerah yang perlu dikenali adalah antara lain sebagai berikut:

a. Perkembangan Penduduk dan Urbanisasi

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi, yang mampu menyebabkan suatu wilayah berubah cepat dari desa pertanian menjadi agropolitan dan selanjutnya menjadi kota besar. Pertumbuhan penduduk terjadi akibat proses pertumbuhan alami dan urbanisasi. Pertumbuhan alami penduduk menjadi faktor utama yang berpengaruh pada ekonomi wilayah karena menciptakan kebutuhan akan berbagai barang dan jasa. Penduduk yang bertambah membutuhkan pangan. Rumah tangga baru juga membutuhkan rumah baru atau renovasi rumah lama berikut perabotan, alat-alat rumah tangga dan berbagai produk lain. Dari sini kegiatan pertanian dan industri berkembang. Urbanisasi dilakukan oleh orang-orang usia muda yang pergi mencari pekerjaan di industri atau perusahaan yang jauh dari tempat dimana mereka berasal. Perpindahan ke wilayah lain dari desa atau kota kecil telah menjadi tren dari waktu ke waktu akibat pengaruh dari televisi, perusahaan pengarah tenaga kerja, dan berbagai sumber lainnya. Suatu kajian mengindikasikan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan perpindahan ini. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat perpindahan pun semakin tinggi. Hal ini semakin meningkat dengan semakin majunya telekomunikasi, komputer dan aktivitas *high tech* lainnya yang memudahkan akses keluar wilayah. Urbanisasi orang-orang muda ini dipandang pelakunya sebagai penyaluran kebutuhan ekonomi mereka namun merupakan peristiwa yang kurang menguntungkan bagi wilayah itu bila terjadi dalam jumlah besar. Untuk mengurangi migrasi keluar ini, masyarakat perlu untuk mulai melatih angkatan kerja pada tahun-tahun pertama usia kerja dengan memberikan pekerjaan sambilan, selanjutnya merencanakan masa depan mereka sebagai tenaga dewasa yang suatu saat akan membentuk keluarga. Sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap tinggal adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai. Lembaga pendidikan/pelatihan dan dunia usaha perlu menyadari adanya kebutuhan untuk membangun hubungan kerjasama. Pendidikan mencari cara agar mereka cukup berguna bagi pengusaha lokal dan pengusaha lokal mengandalkan pada pendidikan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal. Jika metode pendidikan yang ada tidak dapat mengatasi tantangan yang dihadapi, maka ada keperluan untuk mendatangkan tenaga ahli dari wilayah lain untuk memberikan

pelatihan yang dapat menyuplai tenaga kerja terampil bagi pengusaha lokal.

b. Sektor Pertanian

Di setiap wilayah berpenduduk selalu terjadi kegiatan pembangunan, namun ada beberapa wilayah yang pembangunannya berjalan di tempat atau bahkan berhenti sama sekali, dan wilayah ini kemudian menjadi wilayah kelas kedua dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mengakibatkan penanam modal dan pelaku bisnis keluar dari wilayah tersebut karena wilayah itu dianggap sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat berusaha. Akibatnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah itu menjadi semakin lambat. Upaya pengembangan sektor agribisnis dapat menolong mengembangkan dan mempromosikan agroindustri di wilayah tertinggal. Program kerjasama dengan pemilik lahan atau pihak pengembang untuk mau meminjamkan lahan yang tidak dibangun atau lahan tidur untuk digunakan sebagai lahan pertanian perlu dikembangkan. Dari jumlah lahan pertanian yang tidak produktif ini dapat diciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi penganggur di perdesaan. Program kerjasama mengatasi keterbatasan modal, mengurangi resiko produksi, memungkinkan petani memakai bahan baku impor dan produk yang dihasilkan dapat mampu bersaing dengan barang impor yang sejenis serta mencarikan dan membuka pasaran yang baru. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Globalisasi adalah faktor luar yang dapat menyebabkan merosotnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Sebagai contoh, karena kebijakan AFTA, maka di pasaran dapat terjadi kelebihan stok produk pertanian akibat impor dalam jumlah besar dari negara ASEAN yang bisa merusak sistem dan harga pasar lokal. Untuk tetap dapat bersaing, target pemasaran yang baru harus segera ditentukan untuk menyalurkan kelebihan hasil produksi pertanian dari petani lokal. Salah satu strategi yang harus dipelajari adalah bagaimana caranya agar petani setempat dapat mengikuti dan melaksanakan proses produksi sampai ke tingkat penyaluran. Namun daripada bersaing dengan produk impor yang masuk dengan harga murah, akan lebih baik jika petani setempat mengolah komoditi yang spesifik wilayah tersebut dan menjadikannya produk yang bernilai jual tinggi untuk kemudian disebarluaskan di pasaran setempat maupun untuk diekspor. Apa yang telah terjadi di Pulau Jawa kiranya perlu

dihindari oleh daerah-daerah lain. Pengalihan fungsi sawah menjadi fungsi lain telah terjadi tanpa sulit dicegah. Hal ini mengurangi pemasukan ekonomi dari sektor pertanian di wilayah tersebut, disamping itu juga menghilangkan kesempatan untuk menjadikan wilayah yang mandiri dalam pengadaan pangan, termasuk mengurangi kemungkinan berkembangnya wisata ekologi yang memerlukan lahan alami.

c. Sektor Pariwisata

Pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Kawasan sepanjang pantai yang bersih dapat menjadi daya tarik wilayah, dan kemudian berlanjut dengan menarik turis dan penduduk ke wilayah tersebut. Sebagai salah satu lokasi rekreasi, kawasan pantai dapat merupakan tempat yang lebih komersial dibandingkan kawasan lain, tergantung karakteristiknya. Sebagai sumber alam yang terbatas, hal penting yang harus diperhatikan adalah wilayah pantai haruslah menjadi aset ekonomi untuk suatu wilayah. Wisata ekologi memfokuskan pada pemanfaatan lingkungan. Kawasan wisata ekologi merupakan wilayah luas dengan habitat yang masih asli yang dapat memberikan landasan bagi terbentuknya wisata ekologi. Hal ini merupakan peluang unik untuk menarik pasar wisata ekologi. Membangun tempat ini dengan berbagai aktivitas seperti berkuda, surfing, berkemah, memancing dan lain-lain akan dapat membantu perluasan pariwisata serta mengurangi kesenjangan akibat pengangguran. Wisata budaya merupakan segmen yang berkembang cepat dari industri pariwisata. Karakter dan pesona dari desa/kota kecil adalah faktor utama dalam menarik turis. Namun kegiatan pariwisata bersifat musiman, sehingga banyak pekerjaan bersifat musiman juga, yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menyebabkan ekonomi lokal dapat rentan terhadap perputaran siklus ekonomi. Ekonomi wilayah sebaiknya tidak berbasis satu sektor tertentu. Keanekaragaman ekonomi diperlukan untuk mempertahankan lapangan pekerjaan dan untuk menstabilkan ekonomi wilayah. Ekonomi yang beragam lebih mampu bertahan terhadap *konjungtur* ekonomi.

d. Kualitas Lingkungan

Persepsi atas suatu wilayah apakah memiliki kualitas hidup yang baik merupakan hal penting bagi dunia usaha untuk melakukan penanaman modal. Penanaman modal pemerintah daerah yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Jika masyarakat ingin menarik modal dan penanaman modal, maka haruslah siap untuk memberi perhatian terhadap: keanekaragaman, identitas dan sikap bersahabat. Pengenalan terhadap fasilitas untuk mendorong kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah dan dapat menarik bagi investor luar perlu dilakukan. Kawasan bersejarah adalah pembentuk kualitas lingkungan yang penting. Pelestarian kawasan bersejarah berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi lokal seperti keuangan daerah, permukiman, perdagangan kecil, dan pariwisata dengan menciptakan pekerjaan yang dapat signifikan. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap kualitas hidup, meningkatkan citra masyarakat dan menarik kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi penduduk. Pelestarian kawasan bersejarah memberikan perlindungan kepada warisan budaya dan membuat masyarakat memiliki tempat yang menyenangkan untuk hidup. Investor dan developer umumnya menilai kekuatan wilayah melalui kualitas dan karakter dari wilayahnya, salah satunya adalah terpeliharanya kawasan bersejarah. Selain aset alam dan budaya, sarana umum merupakan penarik kegiatan bisnis yang penting. Untuk melihat dan mengukur tingkat kenyamanan hidup pada suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan sarana umum di wilayah tersebut. Sarana umum merupakan kerangka utama dari pembangunan ekonomi dan sarana umum ini sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Sarana umum yang paling dasar adalah jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, sistem pengairan, sarana air bersih, penampungan dan pengolahan sampah dan limbah, sarana pendidikan seperti sekolah, taman bermain, ruang terbuka hijau, sarana ibadah, dan masih banyak fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Kepadatan, pemanfaatan lahan dan jarak merupakan tiga faktor utama dalam pengembangan sarana umum yang efektif. Semakin padat dan rapat penduduk, biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana umum jauh lebih murah jika dilihat daya tampung per unitnya. Pola pembangunan yang padat, kompak dan teratur, berbiaya lebih murah daripada

pembangunan yang linier atau terpencar-pencar. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pengadaan sarana umum maka akan semakin memperkuat dan memperkuat pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Sarana umum yang baru perlu dibangun sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Idealnya fasilitas sarana umum yang ada harus dapat menampung sesuai dengan kapasitas maksimalnya, sehingga dapat memberikan waktu untuk dapat membangun sarana umum yang baru. Penggunaan lahan dan sarana umum haruslah saling berkaitan satu sama lainnya. Perencana pembangunan seharusnya dapat memprediksikan arah pembangunan yang akan berlangsung sehingga dapat dibuat sarana umum yang baru untuk menunjang kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut. Penyediaan sarana dapat juga dilakukan dengan memberikan potongan pajak dan ongkos kompensasi berupa pengelolaan sarana umum kepada sektor swasta yang bersedia membangun fasilitas umum. Wilayah pinggiran biasanya memiliki karakter sebagai wilayah yang tidak direncanakan, berkepadatan rendah dan tergantung sekali keberadaannya pada penggunaan lahan yang ada. Tempat seperti ini akan membuat penyediaan sarana umum menjadi sangat mahal. Dalam suatu wilayah antara kota, desa dan tempat-tempat lainnya harus ada satu kesatuan. Pemerintah daerah perlu mengenali pola pengadaan sarana umum di suatu wilayah yang efektif, baik di wilayah lama maupun di wilayah pinggiran.

e. Keterkaitan Wilayah dan Aglomerasi

Kemampuan wilayah untuk mengefisienkan pergerakan orang, barang dan jasa adalah komponen pembangunan ekonomi yang penting. Suatu wilayah perlu memiliki akses transportasi menuju pasar secara lancar. Jalur jalan yang menghubungkan suatu wilayah dengan kota-kota lebih besar merupakan prasarana utama bagi pengembangan ekonomi wilayah. Pelabuhan laut dan udara berpotensi untuk meningkatkan hubungan transportasi selanjutnya. Pemeliharaan jaringan jalan, perluasan jalur udara, jalur air diperlukan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan pergerakan barang. Pembangunan prasarana diperlukan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing wilayah. Mengenali kebutuhan pergerakan yang sebenarnya perlu dilakukan dalam merencanakan pembangunan transportasi. Umumnya usaha yang sama cenderung beraglomerasi dan membentuk kelompok usaha dengan

karakter yang sama serta tipe tenaga kerja yang sama. Produk dan jasa yang dihasilkan juga satu tipe. Sumber daya alam dan industri pertanian biasanya berada di tahap awal pembangunan wilayah dan menciptakan kesempatan yang potensial untuk perkembangan wilayah. Pengelompokan usaha (*aglomerasi*) berarti semua industri yang saling berkaitan saling membagi hasil produk dan keuntungan. Pengelompokan itu juga menciptakan potensi untuk menciptakan jaringan kerjasama yang dapat membangun kegiatan pemasaran bersama dan untuk menarik kegiatan lainnya yang berkaitan ke depan atau ke belakang. Pertumbuhan ekonomi yang sehat sangat penting jika suatu wilayah ingin bersaing di pasar lokal dan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan kawasan yang terpadu diperlukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Prioritas utama adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang menunjukkan tanda-tanda aglomerasi dengan seluruh kegiatan dan institusi yang membentuknya. Kemungkinan kawasan ini menjadi pusat usaha dan perdagangan tergantung pada jaringan transportasi yang baik, prasarana yang lengkap, tempat kerja yang mudah dicapai, dukungan modal, dan kesempatan pelatihan/pendidikan.

2.4 Investasi

2.4.1 Definisi Investasi

Dalam teori ekonomi secara umum, investasi diartikan sebagai penanaman dalam bentuk barang modal riil (Slamet,2001:3). Beberapa pengertian investasi:

- Investasi adalah suatu kegiatan yang menunda konsumsi/penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Eka Putra,2003:1)
- Investasi adalah penanaman dana dalam berbagai jenis portofolio surat berharga (Siamat,2001:4)
- Investasi adalah penggunaan untuk objek-objek tertentu dengan tujuan bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu investasi akan meningkat, paling tidak bertahan dan selama jangka waktu itu pula memberikan hasil secara teratur (Koetin,1993: 16)
- Investasi adalah pembelian oleh perorangan atau institusi yang berhubungan dengan keuangan atau kepemilikan yang menghasilkan pengembalian yang sepadan karena mengambil resiko selama periode atau waktu yang panjang (Amling,1988,7)

Secara umum terdapat dua jenis investasi, yaitu investasi yang terdorong dan investasi otonom. Investasi yang terdorong yakni investasi yang tidak diadakan akibat adanya penambahan permintaan, penambahan permintaan yang di akibatkan penambahan pendapatan. Jelasnya apabila pendapatan bertambah, maka tambahan permintaan akan di gunakan untuk konsumsi, sedang penambahan konsumsi pada dasarnya adalah tambahan permintaan. Sudah pasti apabila ada tambahan permintaan, maka akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi tambahan permintaan tersebut.

Investasi otonom yaitu investasi yang di laksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi yang di adakan bukan karena penambahan permintaan efektif, tetapi justru untuk menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom tidak tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional atau daerah. Investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak di pengaruhi oleh pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang di lakukan oleh perusahaan-perusahaan. (Sukirno, 2004: 108).

Investasi oleh masyarakat lebih banyak di lakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau motif bisnis, begitu juga dengan investasi asing atau penanaman modal luar negeri dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau motif bisnis di lain sisi kita mendapatkan dampak positifnya.

2.4.2 Indikator Investasi

Investasi yang ditanam di suatu negara atau daerah, di tentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Tingkat keuntungan yang diramalkan

Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada pengusaha mengenai jenis-jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan di masa depan, dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang di perlukan.

b. Tingkat Bunga

Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha, dan para investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang di tanam, berupa persentase keuntungan netto (belum dikurangi dengan tingkat bunga yang di bayar), modal yang di peroleh lebih besar dari tingkat bunga. Seorang investor mempunyai dua pilihan di dalam

menggunakan modal yang dimilikinya yaitu: pertama, dengan meminjamkan atau membungakan uang tersebut (deposito); kedua, dengan menggunakannya untuk investasi. Dalam hal dimana pendapatan yang diperoleh adalah lebih dari tingkat bunga, maka pilihan terbaik adalah menandatangani uang tersebut, dan akan menggunakannya untuk investasi apabila tingkat keuntungan yang di peroleh adalah lebih besar dari tingkat bunga yang akan dibayar.

- c. Ramalan mengenai ekonomi di masa depan
Dengan adanya ramalan tentang kondisi masa depan akan dapat menentukan tingkat investasi yang akan tercipta dalam perekonomian. Apabila ramalan di masa depan adalah baik maka investasi akan naik. Sebaliknya, apabila ramalan kondisi ekonomi di masa akan datang adalah buruk, maka tingkat investasi akan rendah.
- d. Kemajuan teknologi
Dengan adanya temuan-temuan teknologi (inovasi), maka akan semakin banyak kegiatan pembaharuan yang akan di lakukan oleh pengusaha, sehingga makin tinggi tingkat investasi yang dicapai.
- e. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya
Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan Masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total agregat demand yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain (Induced Investment).
- f. Keuntungan yang di peroleh
Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan mendorong para pengusaha untuk menyediakan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru.
- g. Situasi politik
Kestabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para investor terutama para investor asing, untuk menanamkan modalnya. Mengingat bahwa investasi memerlukan suatu jangka waktu yang relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang di tanam dan memperoleh keuntungan. Sehingga stabilitas politik jangka panjang akan di harapkan oleh investor.
- h. Pengeluaran yang di lakukan pemerintah.
Pengeluaran-pengeluaran yang di lakukan oleh pemerintah dapat berupa pengeluaran pembangunan dan rutin baik itu dalam penyediaan sarana dan prasarana atau fasilitas publik dalam menunjang kegiatan investasi dan juga

perekonomian secara keseluruhan baik itu skala nasional maupun daerah. Sehingga menarik para investor dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di suatu negara ataupun daerah.

2.4.3 Fungsi dan Peran Investasi dalam Perekonomian

Investasi dalam berbagai bentuknya akan memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian suatu negara ataupun dalam cakupan yang lebih kecil yakni daerah. Karena dengan terciptanya investasi akan membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu.

Investasi yang akan berlanjut dengan suatu proses produksi akan menciptakan lapangan kerja, menciptakan barang-barang dan jasa untuk di pasarkan kepada konsumen, dan interaksi antara produsen, dalam hal ini investor, dan konsumen dalam menawarkan dan mengkonsumsi barang-barang atau jasa, dan pada gilirannya akan menciptakan kemajuan perekonomian dalam suatu negara. Adanya fluktuasi dalam investasi seperti yang terlihat dalam "*business cycle*" merupakan salah satu dampak dari adanya investasi di dalam suatu perekonomian.

Pengeluaran investasi merupakan topik utama dalam ekonomi makro karena dua alasan berikut:

- Fluktuasi investasi sangatlah besar sesuai dengan perubahan GDP (*Gross Domestic Product*), misalnya karena adanya *business cycle*.
- Pengeluaran investasi menentukan tingkat pertumbuhan stok kapital dalam perekonomian, dimana stok kapital ini sangat menentukan tingkat pertumbuhan suatu negara dalam jangka panjang (Nangan, 2005 :131).

Investasi yang di tanamkan dalam perekonomian salah satunya ditentukan oleh adanya permintaan dari masyarakat, yaitu berupa konsumsi atas barang-barang konsumsi dan jasa yang di hasilkan oleh perusahaan sehingga merangsang tumbuhnya investasi-investasi baru. Karena seperti kita ketahui bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat akan di gunakan untuk konsumsi dan mungkin sebagian lagi untuk di tabung. Sehingga apabila penggunaan pendapatan untuk konsumsi dilambangkan dengan C, dan penggunaan pendapatan yang di terima dilambangkan dengan Y, maka perumusan menjadi $Y = C + S$. Seandainya keseluruhan pendapatan masyarakat itu dikonsumsi keseluruhannya ($MPC=1$), sehingga besarnya K menjadi tidak terhingga, maka besarnya pertumbuhan pendapatan nasional juga menjadi tidak terhingga. Khusus kondisi di negara berkembang, dimana income masyarakat relatif rendah, kendati pendapatan masyarakat yang di terima di asumsikan keseluruhannya, dampaknya terhadap pertumbuhan pendapatan nasional tidak akan terlalu besar.

Hal ini disebabkan karena kemampuan dalam pembentukan modal juga relatif rendah yang disebabkan oleh lemahnya kemampuan menabung dari masyarakatnya yang tentu saja akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya lembaga-lembaga keuangan padahal faktor-faktor tersebut sangat diperlukan di dalam proses pembangunan guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Pembentukan modal merupakan faktor yang paling penting dan strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai "kunci utama menuju pembangunan ekonomi". Proses ini berjalan melewati 3(tiga) tingkatan:

- a. Kenaikan tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menabung.
- b. Keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk mengalahkan dan menyalurkan tabungan agar dapat menjadi dana yang dapat di investasikan.
- c. Penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal pada perusahaan.

Pembentukan modal juga berarti pembentukan keahlian kerap kali berkembang sebagai akibat pembentukan modal. (Jhingan:60). Pembentukan keahlian jelas merupakan salah satu dampak dari adanya perkembangan investasi. Investasi yang terus berkembang akan menuntut perkembangan sumber-sumber daya termasuk keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pembentukan atau penciptaan modal akan menjadi sia-sia kalo tidak ada faktor-faktor lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi oleh karena itu, kehadiran sekelompok atau segolongan orang yang benar-benar tertarik pada pembangunan ekonomi, mempunyai kemauan menabung dan bersedia bekerja dengan imbalan material, merupakan prasyarat bagi kemajuan suatu perekonomian. (Jhingan).

Harold dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi, yaitu:

1. Menciptakan pendapatan.
2. Memperbesar kapasitas produksi perekonomian.

Kedua hal ini sebagai dampak dari adanya permintaan dan penawaran investasi. Karena itu selama investasi berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada tingkat *full employment* dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut, keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas modal meningkat. Karena kalau tidak, setiap perbedaan keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas modal meningkat.

Karena kalau tidak, setiap perbedaan keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas yang menganggur. Hal ini memaksa para investor membatasi pengeluaran investasinya sehingga pada akhirnya akan berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu berupa menurunnya pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya. Jadi, apabila pekerjaan ingin dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar.

Dalam konteks yang lain, penciptaan investasi juga membawa pengaruh perkembangan suatu daerah. Dampak tersebut disebut dengan *spread effect*. Yaitu apabila suatu investasi yang di tanamkan di dalam suatu daerah membawa pengaruh positif bagi daerah lainnya. Seperti timbulnya industri-industri perlengkapan atau penunjang bagi industri utama di daerah pusat investasi.

2.4.4 Hubungan Investasi dan Pembiayaan Pembangunan

Dinoroy Aritonang berpendapat bahwa peran dan dukungan investasi begitu penting terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebab sejumlah proyek infrastruktur membutuhkan dukungan dana yang besar, bukan hanya infrastruktur ekonomi tetapi juga infrastruktur di bidang sosial dan kehidupan bermasyarakat.

Dalam kerangka pembangunan, salah satu sumber penting bagi tercapainya pembangunan yang berkualitas adalah investasi. Mengapa investasi sedemikian penting bagi pembangunan ekonomi? Hal ini antara lain karena investasi dapat dilihat dari pengaruh investasi bagi pertumbuhan agregat yaitu dengan mendorong tingkat output dan kesempatan kerja; dan efeknya terhadap pembentukan kapital yang dalam jangka panjang akan meningkatkan potensi output dan menjaga pertumbuhan (Hamid, 2006:165).

Harrod-Domar menerangkan adanya kolerasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di daerah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Ketimpangan distribusi investasi di daerah dapat dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi.

2.4.5 Kriteria Penilaian Investasi

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan investasi untuk dilaksanakan dipandang dari aspek profitabilitas komersial.

Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih (*PV of Proceed*) dengan PV investasi (*Capital Outlays*) selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV itulah yang dikenal dengan *Net Present Value* (NPV).

Internal Rate of Return (IRR)

Nilai sekarang bersih atau *Net Present Value* kadang-kadang kurang lengkap untuk digunakan sebagai satu-satunya penilaian investasi. Karena dalam nilai sekarang bersih hanya diketahui bahwa nilai sekarang penanaman lebih besar dari jumlah investasi awal. Tetapi kelebihan dari hasil diatas investasi awal secara persentase tidak diketahui, oleh karena itu perusahaan ingin mengetahui persentase dari pengambilan penanaman modal setelah dikonversi kedalam nilai sekarang.

Average Rate of Return (ARR)

Metode ini membandingkan tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh dan suatu investasi. Angka yang dipergunakan adalah laba bersih setelah pajak dibanding dengan total atau rata-rata investasi. Hasil yang diperoleh dinyatakan dengan persentase, angka ini kemudian dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang di syaratkan.

Payback Period (PB Period)

Pengertian dari Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi (*initial cash investment*) dengan menggunakan aliran kas. Dengan kata lain *Payback Period* merupakan rasio antara *initial cash ratio* dan *cash inflow* yang hasilnya merupakan satuan waktu. Dapat juga diartikan bahwa *payback period* adalah suatu periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi.